

PENGUNAAN DANA DESA DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DESA TELUK NILAP KECAMATAN KUBU BABUSSALAM KABUPATEN ROKAN HILIR PROVINSI RIAU

Randi Darmawansyah¹, Syapsan², Dahlan Tampubolon³
^{1,2,3}Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Riau, Pekanbaru
Corresponding Email: Randidarmawansyah88@gmail.com

Abstract

This study aims to analyze the relationship between the use of the Village Fund in the field of infrastructure development implementation on the welfare of the community and the use of the Village Fund in the field of community empowerment on the welfare of the people of Teluk Nilap Village, Kubu Babussalam District, Rokan Hilir Regency, Riau Province. The data used in this study is primary data using a cross sectional research design. This study uses the Spearman rank correlation analysis method with the help of SPSS for Windows version 24.0 software. From the results of the analysis, it can be said that the allocation of the Teluk Nilap Village Fund, Kubu Babussalam District, Rokan Hilir Regency in the field of infrastructure development has a positive and significant relationship with increasing community welfare. The allocation of Teluk Nilap Village Funds, Kubu Babussalam District, Rokan Hilir Regency in the field of community empowerment has a positive and significant relationship with improving community welfare.

Key words : Village Fund, Infrastructure, empowerment, welfare

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan penggunaan Dana Desa bidang pelaksanaan pembangunan infrastruktur terhadap kesejahteraan masyarakat dan penggunaan Dana Desa bidang pemberdayaan masyarakat terhadap kesejahteraan masyarakat Desa Teluk Nilap Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dengan menggunakan desain penelitian cross sectional. Penelitian ini menggunakan metode analisis korelasi spearman rank dengan bantuan software SPSS for Windows versi 24.0. dari hasil analisis yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa pengalokasian Dana Desa Teluk Nilap Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir bidang pembangunan infrastruktur memiliki hubungan yang positif dan signifikan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pengalokasian Dana Desa Teluk Nilap Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir bidang pemberdayaan masyarakat memiliki hubungan yang positif dan signifikan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Kata Kunci: Dana Desa, infrastruktur, pemberdayaan, kesejahteraan

PENDAHULUAN

Program Nawacita atau Sembilan agenda pembangunan mengilhami dan masuk kedalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. RPJMN akan menjadi penuntun pemerintah dalam kebijakan lima tahun kedepan. Sehingga menjadi pondasi pembangunan yang kuat dimasa mendatang. Program yang ketiga dari Nawacita adalah membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. Agenda ini memberi indikasi bahwa pola perencanaan dan

pelaksanaan pembangunan di Indonesia tidak lagi sepenuhnya bersifat *top down*, tetapi sudah mulai diimplementasikan sebaliknya, yaitu *bottom up*. Agenda Nawacita yang ketiga ini sekaligus merupakan pengakuan negara pada keberadaan desa. Desa merupakan unit terkecil dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. Hal ini bermakna bahwa pemerintah desa yang disebut kepala desa, memiliki kewenangan yang berskala lokal, yaitu seluas wilayah administrasi desa.

Berdasarkan Undang-Undang No 6 tahun 2014 Tentang Desa. Bahwa desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Desa diberikan kewenangan dan sumber dana yang memadai agar dapat mengelola potensi yang dimilikinya guna meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Setiap tahun pemerintah pusat telah mengalokasikan Dana Desa yang cukup besar untuk diberikan kepada desa. pada tahun 2015, Dana Desa di anggarkan sebesar 20,7 triliun, dengan rata-rata setiap desa mendapatkan alokasi sebesar 280 juta. Pada tahun 2016, Dana Desa meningkat menjadi 46,98 triliun dengan rata-rata setiap desa menerima sebesar 628 juta dan di tahun 2017 kembali meningkat menjadi 60 triliun dengan rata-rata setiap desa 800 juta. Pada tahun 2018 Dana Desa juga di anggarkan 60 triliun. Pada tahun 2019 anggaran Dana Desa meningkat menjadi 70 triliun dengan rata-rata setiap desa menerima 933,92 juta. Kemudian di 2020 meningkat lagi menjadi 72 triliun dengan rata-rata masing desa menerima 960 juta (Kementrian Keuangan, 2020).

Besarnya Dana Desa yang diperoleh desa menjadi perhatian masyarakat dalam hal penggunaan dana yang di putuskan oleh pemerintah desa, apakah sudah sesuai dengan kebutuhan dan prioritas khususnya kebijakan penggunaan Dana Desa. Penggunaan Dana Desa dapat dimanfaatkan dan dikelola untuk mengurangi ketimpangan ekonomi dalam masyarakat. Adapun peruntukan Dana Desa adalah 1) Bidang Pembangunan Desa, 2) Bidang Pembangunan Ekonomi, 3) Bidang Pembangunan Sosial, dan 4) Bidang Pembangunan Kesejahteraan Masyarakat, (Tampubolon et al., 2018).

Menurut Deputy Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah (2015) Dana Desa digunakan untuk membiayai bidang penyelenggaraan pemerintahan, bidang

pelaksanaan pembangunan infrastruktur, bidang pembinaan kemasyarakatan, bidang pemberdayaan masyarakat dan bidang tak terduga. Menurut Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 Pasal 5 Ayat 1 penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan dibidang pembangunan desa dan pemberdayaan desa. Penggunaan Dana Desa yang diduga belum optimal serta tingkat kesadaran dan partisipasi masyarakat yang masih rendah membuat masih banyaknya desa di berbagai daerah masih tertinggal dalam program-program pemberdayaan yang didanai oleh Dana Desa.

Dana Desa merupakan hal yang diharapkan dapat membawa perubahan yang cepat bagi masyarakat desa. penelitian ini kemudian diharapkan dapat menggambarkan bagaimana hubungan penggunaan Dana Desa bidang pembangunan infrastruktur dan bidang pemberdayaan masyarakat terhadap kesejahteraan masyarakat.

KAJIAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

1. Pengertian Desa

Secara etimologi kata desa berasal dari bahasa saksekerta, yaitu deca yang memiliki arti tanah air, tanah asal, atau tanah kelahiran. (Widjaja, 2003) menjelaskan dalam buku nya yang berjudul "Pemerintahan Desa/Marga Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah" bahwa desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di daerah Kabupaten. Dalam arti lain desa adalah bentuk kesatuan administratif yang disebut juga Kelurahan. Dengan demikian, di luar maupun dalam kota juga disebut desa. Pengertian desa seperti ini diperkenalkan oleh pemerintah Republik Indonesia setelah masa kemerdekaan dan berlaku di seluruh Indonesia. Desa yang memiliki kegiatan utama pertanian sering disebut dengan istilah rural atau village, sedangkan desa yang kegiatan utamanya bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi sering disebut dengan istilah urban.

Menurut Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa, desa adalah desa dan adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa dalam segala aspek sesuai keuangan yang dimiliki, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 memberikan mandat pemerintah desa untuk mengalokasikan Dana Desa. Salah satu kebijakan yang mengiringi penetapan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 adalah kebijakan Dana Desa. Melalui Undang-Undang Desa, desa telah diperkuat kewewenangannya dalam penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa. Selain kewewenangannya, desa juga diberikan sumber-sumber pendapatan lain. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 72 ayat (1), pendapatan desa bersumber : (a) Pendapatan asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa (b) Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (c) Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota (d) Alokasi Dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota (e) Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota (f) Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga (g) lain-lain pendapatan desa yang sah.

2. Pengertian Dana Desa

Dana Desa yang selanjutnya disingkat DD adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat 2).

Berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, maka dapat dikaitkan bahwa Dana Desa merupakan wujud dari pemenuhan hak desa untuk menyelenggarakan otonominya agar tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan dari desa itu sendiri, berdasarkan keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratis dan pemberdayaan masyarakat yang sebagaimana telah diatur dalam Undang-undang No.6 tahun 2014 tentang Desa.

Tujuan dari Dana Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Dana Desa, tujuan Dana Desa yaitu: (a) Meningkatkan pelayanan publik di desa (b) Mengetaskan kemiskinan (c)Memajukan perekonomian desa (d) Mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa, serta (e) Memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan.

Dana Desa dihitung berdasarkan jumlah desa dan dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis dalam rangka meningkatkan kesejahteraan pemerataan pembangunan desa. Jumlah penduduk, luas wilayah, dan angka kemiskinan dihitung dengan bobot: (a) 30 persen untuk jumlah penduduk kabupaten/kota (b) 20 persen untuk luas wilayah kabupaten/kota (c) 50 persen untuk angka kemiskinan kabupaten/kota. Berdasarkan besaran Dana Desa setiap kabupaten/kota, Bupati/Walikota menetapkan besaran Dana Desa untuk setiap desa di wilayahnya. Tata cara pembagian dan penetapan besaran Dana Desa setiap desa ditetapkan dengan peraturan Bupati/Walikota.

Penyaluran Dana Desa dilakukan dengan cara pemindah bukuan dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) untuk selanjutnya dilakukan pemindah bukuan dari RKUD ke Rekening Kas Desa (RKD). Penyaluran Dana Desa sebagaimana yang telah diatur diatas dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut: (a) Tahap pertama, pada bulan Maret sebesar 60 persen (b) Tahap kedua, pada bulan Agustus sebesar 40 persen. Penyaluran dari RKUD ke RKD dilakukan paling lambat tujuh hari kerja setelah Dana Desa diterima di RKUD. Ketentuan pengalokasian dan penyaluran Dana Desa di atas berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2016.

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2016 tentang cara pengelolaan, dan evaluasi Dana Desa, Prinsip Penggunaan Dana Desa yaitu: (a) Keadilan:

mengutamakan hak dan kepentingan seluruh warga desa tanpa membeda-bedakan (b) Kebutuhan Prioritas: mendahulukan kepentingan desa yang lebih mendesak, lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian masyarakat desa (c) Kewewenangan desa: mengutamakan kewewenangan hak asal usul dan kewewenangan lokal bersekala desa (d) Partisipatif: mengutamakan prakarsa dan keaktifan masyarakat (e) Swakelola dan berbasis sumber daya desa: mengutamakan pelaksanaan secara mandiri dengan pendayagunaan sumber daya alam desa, mengutamakan tenaga, pikiran dan keterampilan warga desa dan kearifan lokal (f) Tipologi desa: mempertimbangkan keadaan dan kekayaan karakteristik geografis, sosialogis, antropologis, ekonomi dan ekologi desa yang khas, serta perubahan atau perkembangan dan kemajuan desa.

Berdasarkan Permendes Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020. Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat desa berupa: (a) peningkatan kualitas hidup, diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pelayanan sosial dasar yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat (b) peningkatan kesejahteraan, diutamakan untuk: (1) Membiayai pelaksanaan program yang bersifat lintas kegiatan (2) Menciptakan lapangan kerja yang berkelanjutan (3) Meningkatkan pendapatan ekonomi bagi keluarga miskin dan (4) Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PAD). (c) penanggulangan kemiskinan, diutamakan untuk: (1) Membiayai program penanggulangan kemiskinan (2) Meletakkan pemutahiran data kemiskinan (3) melakukan kegiatan akselerasi ekonomi keluarga dan padat karya tunai untuk menyediakan lapangan kerja (4) menyediakan modal usaha dan pelatihan bagi masyarakat desa yang menganggur, setengah menganggur, keluarga miskin dan (5) melakukan pencegahan kekurangan gizi kronis (*stunting*). (d) peningkatan pelayanan publik, diutamakan untuk pelaksanaan program bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial.

3. Bidang pembangunan infrastruktur

Dalam hal pengertian pembangunan, para ahli memberikan pengertian yang bermacam-macam. Istilah pembangunan bisa berbeda beda menurut para ahli sesuai dengan

keadaan daerah dan negaranya. Namun secara umum dapat disepakati bahwa pembangunan adalah proses untuk melakukan perubahan. Sedangkan infrastruktur adalah fasilitas publik yang bersifat fundamental yang di tujukan kepada masyarakat/khalayak ramai untuk melayani dan memudahkan masyarakat. Menurut Kuncoro, (2010) Infrastruktur mengacu pada sistem fisik yang menyediakan transportasi, air, bangunan, dan fasilitas publik lain yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia secara ekonomi dan sosial.

Nyoman (1991) Membagi pembangunan infrastruktur dalam 3 bagian, yaitu: (a) Pembangunan infrastruktur transportasi pedesaan, guna mendukung peningkatan aksesibilitas masyarakat desa, yaitu: jalan, jembatan, tambatan perahu. (b) Pembangunan infrastruktur yang mendukung produksi pertanian, yaitu: irigasi pedesaan. (c) Pembangunan infrastruktur yang mendukung pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, yaitu: penyediaan air minum, sanitasi pedesaan.

4. Bidang pemberdayaan masyarakat

Pemberdayaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah upaya membuat suatu berkemampuan atau berkekuatan. Pemberdayaan masyarakat desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa (Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi RI Nomor 11 Tahun 2019).

Wrihatnolo dan Dwidjowijoto, (2007) mengemukakan bahwa terdapat empat indikator dalam pemberdayaan, yaitu: (a) Akses, yaitu target yang diberdayakan pada akhirnya mempunyai akses akan sumber pendapatan yang diperlukannya untuk mengembangkan diri. (b) Partisipasi, yaitu target yang diberdayakan pada akhirnya dapat berpartisipasi mendayagunakan sumber pendapatan yang diaksesnya. (c) Kontrol, yaitu target yang diberdayakan pada akhirnya mempunyai kemampuan mengontrol proses pendayagunaan sumber pendapatan yang diaksesnya. (d) Kesenjangan, yaitu pada tingkat tertentu saat terjadi konflik, target mempunyai kedudukan yang sama dengan yang lain dalam hal pemecahan masalah.

5. Kesejahteraan masyarakat

Menurut Todaro dan Smith, (2006) kesejahteraan masyarakat adalah ukuran hasil pembangunan masyarakat dalam mencapai kehidupan yang lebih baik yang meliputi : pertama, peningkatan kemampuan dan pemerataan distribusi kebutuhan dasar seperti makanan, perumahan, kesehatan, dan perlindungan; kedua, peningkatan tingkat kehidupan, tingkat pendapatan, pendidikan yang lebih baik, dan peningkatan atensi terhadap budaya dan nilai kemanusiaan dan ketiga, memperluas skala ekonomi dan ketersediaan pilihan sosial dari individu dan bangsa.

Menurut Soetomo, (2014) indikator kesejahteraan masyarakat mengandung tiga komponen yaitu: (a) Keadilan sosial meliputi: pendidikan, kesehatan, akses pada listrik dan air, serta penduduk miskin. (b) Keadilan ekonomi meliputi : pendapatan, kepemimpinan rumah, dan tingkat pengeluaran. (c) Keadilan demokrasi meliputi : rasa aman dan akses informasi.

Definisi kesejahteraan dalam konsep dunia moderen adalah sebuah kondisi dimana seorang dapat memenuhi kebutuhan pokok, baik itu kebutuhan akan makanan, pakaian, tempat tinggal, air minum yang bersih serta kesempatan untuk melanjutkan pendidikan dan memiliki pekerjaan yang memadai yang dapat menunjang kualitas hidupnya sehingga memiliki status sosial yang mengantarkan pada status sosial yang sama terhadap sesama warga lainnya (Basri, 2005).

6. Pengeluaran pemerintah

Grand theory yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengeluaran pemerintah. Menurut Sukirno, (2013) Pengeluaran Pemerintah (*goverment expenditure*) adalah bagian dari kebijakan fiskal, yaitu suatu tindakan pemerintah untuk mengatur jalannya perekonomian dengan cara menentukan besarnya penerimaan dan pengeluaran pemerintah setiap tahunnya, yang tercermin dalam dokumen Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) untuk nasional dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) untuk daerah atau regional. Kebijakan pemerintah mencerminkan pengeluaran pemerintah. Apabila pemerintah telah menetapkan suatu kebijakan untuk membeli barang dan jasa, pengeluaran pemerintah mencerminkan biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah untuk melaksanakan kebijakan tersebut (Mangkoesebroto, 2002). Dasar teori Pengeluaran pemerintah dapat dilihat dari identitas keseimbangan pendapatan nasional yaitu $Y = C + I + G + (X-M)$ yang merupakan

sumber legitimasi pandangan kaum Keynesian akan relevansi campur tangan pemerintah dalam perekonomian. Dari persamaan diatas dapat dianalisis bahwa kenaikan atau penurunan pengeluaran pemerintah akan menaikkan atau menurunkan pendapatan nasional. Banyak pertimbangan yang mendasari pengambilan keputusan pemerintah dalam mengatur pengeluarannya (Dumairy, 2006). Pengeluaran pemerintah daerah adalah belanja pemerintah daerah yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Pengeluaran untuk menyediakan fasilitas pendidikan dan kesehatan, pengeluaran menyediakan polisi dan tentara, pengeluaran gaji pegawai dan pengeluaran untuk pengembangan infrastruktur untuk kepentingan masyarakat (Haryanto, 2013).

Teori mengenai pengeluaran pemerintah dapat dikelompokan dalam dua bagian yaitu teori makro dan teori mikro. Dalam teori makro menurut Boediono, (1998) pengeluaran pemerintah dapat digolongkan dalam tiga bagian utama yaitu: (a) Pengeluaran pemerintah untuk pembelian barang dan jasa. (b) Pengeluaran pemerintah untuk gaji pegawai. (c) Pengeluaran pemerintah untuk *transfer paymen*.

Sedangkan menurut teori mikro, perkembangan pengeluaran pemerintah adalah untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi tersedianya barang publik. Interaksi antara permintaan dan penawaran barang publik menentukan jumlah barang publik yang akan disediakan melalui anggaran belanja. Jumlah barang publik yang akan disediakan tersebut, akan menimbulkan permintaan barang lain. Terkait dengan perkembangan pengeluaran pemerintah, hal ini dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu (Mangkoesoebroto, 2002): (a) Perubahan permintaan akan barang publik. (b) Perubahan dari aktivitas pemerintah dalam menghasilkan barang publik dan juga perubahan dari kombinasi faktor produksi yang digunakan dalam proses produksi. (c) Perubahan kualitas barang public. (d) Perubahan harga faktor produksi.

Dana Desa merupakan salah satu pengeluaran pemerintah atau belanja pemerintah yang berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang diberikan kepada setiap desa sebagai salah satu sumber pendapatan desa yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa. Keberadaan Dana Desa ini menjadi faktor penting sebagai stimulus yang mampu mengubah dan memperlancar roda pembangunan ekonomi pinggiran di

desa. Program desa akan berjalan sesuai dengan target waktu dan sesuai dengan harapan apabila didukung oleh Dana Desa yang akan memperlancar proses pembangunan di desa. Pengeluaran pemerintah khususnya belanja modal dapat meningkatkan kesejahteraan suatu daerah. Agar kesejahteraan masyarakat desa terpenuhi, untuk itu perlu ikut andil pemerintah pusat maupun daerah dalam penyaluran dan pengelolaan Dana Desa secara efektif.

Perumusan masalah yang dibuat yaitu sebagai berikut: 1) Apakah penggunaan Dana Desa bidang pembangunan infrastruktur memiliki hubungan terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat Desa Teluk Nilap Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau ?, 2) Apakah penggunaan Dana Desa bidang pemberdayaan masyarakat Desa memiliki hubungan terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat Desa Teluk Nilap Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau ?

Sedangkan perumusan hipotesis penelitian yang diajukan untuk menjawab rumusan masalahnya sebagai berikut : 1) Penggunaan Dana Desa bidang pembangunan infrastuktur memiliki hubungan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa Teluk Nilap Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau. 2) Penggunaan Dana Desa bidang pemberdayaan masyarakat memiliki hubungan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa Teluk Nilap Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian semi kuantitatif. Objek penelitian pada Desa Teluk Nilap Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh masyarakat Desa Teluk Nilap yaitu sejumlah 8132 jiwa dan sampel yang diambil oleh peneliti diambil dengan menggunakan rumus sovini yaitu berjumlah 100 responden dengan teknik proposional random sampling. Sedangkan teknik mengumpulkan data dalam penelitian ini melalui wawancara, kuesioner, studi dokumen dan observasi. Peneliti melakukan wawancara pada Kepala Desa dan Bendahara Desa Teluk Nilap untuk mendapatkan informasi yang lebih mendalam tentang penggunaan Dana Desa di Desa Teluk Nilap. selanjutnya peneliti menyebarkan kuesioner pada 100 responden pada masyarakat Desa Teluk Nilap untuk mengetahui bagaimana tanggapan masyarakat terhadap

kesejahteraan masyarakat, penggunaan Dana Desa bidang pembangunan infrastruktur, penggunaan Dana Desa bidang pemberdayaan masyarakat di Desa Teluk Nilap. Teknik analisis data yang digunakan yaitu analisis korelasi *spearman rank*.

HASIL PENELITIAN

1. Deskripsi Jawaban Responden Setiap Variabel

Untuk mendapatkan kriteria dari nilai rata-rata jawaban responden dimasukkan berdasarkan kelas interval, penentuan kelas intervalnya maka digunakan rumus sebagai berikut :

$$Interval\ Kelas = \frac{Nilai\ Tertinggi - Nilai\ Terendah}{Jumlah\ Kelas}$$

Dimana nilai tertinggi jawaban responden adalah 5, dan nilai terendah jawaban responden adalah 1, dengan jumlah kelas adalah 5. Sehingga berdasarkan rumus diatas, diperoleh nilai Interval Kelas = 0,8; sehingga diperoleh ketentuan dari kategori jawaban responden sebagai berikut :

Tabel 1: Nilai Interval dan Kategori Jawaban Responden

Nilai Interval	Kategori
1,00 – 1,79	Sangat Tidak Baik
1,80 – 2,59	Kurang Baik
2,60 – 3,39	Cukup Baik
3,40 – 4,19	Baik
4,20 – 5,00	Sangat Baik

Sumber : Data Olahan, 2021

Berdasarkan hasil penelitian secara empiris diperoleh nilai rata-rata untuk setiap butir pernyataan pada masing-masing variabel penelitian seperti dijelaskan pada masing-masing analisa deskriptif variabel penelitian.

Tabel 2: Hasil Jawaban Responden Tentang Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat (Y)

No	Item		SS	S	CS	TS	STS	Total	Rata-rata
1	Menurut saya dengan ada Dana Desa dapat	F	15	41	26	15	3	100	3,50
		S	75	164	78	30	3	350	

	meningkatkan pendidikan masyarakat Desa Teluk Nilap								
2	Menurut saya dengan adanya Dana Desa akses kesehatan Desa Teluk Nilap menjadi lebih mudah	F	26	31	26	14	3	100	3,63
		S	130	124	78	28	3	363	
3	Menurut saya dengan adanya Dana Desa akses pada listrik dan air di Desa Teluk Nilap menjadi semakin mudah	F	8	33	37	22	0	100	3,27
		S	40	132	111	44	0	327	
4	Menurut saya dengan adanya Dana Desa jumlah penduduk miskin di Desa Teluk Nilap menurun	F	28	33	32	7	0	100	3,82
		S	140	132	96	14	0	382	
5	Saya merasa dengan adanya Dana Desa tingkat pendapatan masyarakat di Desa Teluk Nilap meningkat	F	20	29	41	10	0	100	3,59
		S	100	116	123	20	0	359	
6	Saya merasa dengan adanya Dana Desa tingkat Pengeluaran masyarakat di Desa Teluk Nilap meningkat	F	17	40	30	12	1	100	3,60
		S	85	160	90	24	1	360	
7	Saya merasa aman ketika berbicara atau memberikan saran tentang Dana Desa di Desa Teluk Nilap	F	11	34	31	23	1	100	3,31
		S	55	136	93	46	1	331	
8	Adanya Akses informasi yang mudah di akses tentang Dana Desa di Desa Teluk Nilap	F	21	41	21	16	1	100	3,65
		S	105	164	63	32	1	365	
Skor Rata-rata									3,55

Kategori	Baik
----------	------

Sumber : Data Olahan, 2021

Berdasarkan Tabel 2 diatas menunjukkan bahwa tanggapan responden pada item pertama "Menurut saya dengan adanya Dana Desa dapat meningkatkan pendidikan masyarakat Desa Teluk" tanggapan responden dapat dikatakan baik dengan nilai rata-rata adalah 3,50. Pada item ke-2 "Menurut saya dengan adanya Dana Desa akses kesehatan di Desa Teluk Nilap menjadi lebih mudah" tanggapan responden dapat dikatakan baik dengan nilai rata-rata adalah 3,63. Pada item ke-3 "Menurut saya dengan adanya Dana Desa akses pada listrik dan air di Desa Teluk Nilap menjadi semakin mudah" tanggapan responden dapat dikatakan cukup baik dengan nilai rata-rata adalah 3,27. Pada item ke-4 "Menurut saya dengan adanya Dana Desa jumlah penduduk miskin di Desa Teluk Nilap menurun" tanggapan responden dapat dikatakan baik dengan nilai rata-rata adalah 3,82. Pada item ke-5 "Saya merasa dengan adanya Dana Desa tingkat pendapatan masyarakat di Desa Teluk Nilap meningkat" tanggapan responden dapat dikatakan baik dengan nilai rata-rata adalah 3,59. Pada item ke-6 "Saya merasa dengan adanya Dana Desa tingkat Pengeluaran masyarakat di Desa Teluk Nilap meningkat" tanggapan responden dapat dikatakan baik dengan nilai rata-rata adalah 3,60. Pada item ke-7 "Saya merasa aman ketika berbicara atau memberikan saran tentang Dana Desa di Desa Teluk Nilap" tanggapan responden dapat dikatakan cukup baik dengan nilai rata-rata adalah 3,31. Pada item ke-8 "Adanya Akses informasi yang mudah di akses tentang Dana Desa di Desa Teluk Nilap" tanggapan responden dapat dikatakan baik dengan nilai rata-rata adalah 3,65. Jadi dapat disimpulkan bahwa tanggapan responden terhadap pernyataan tentang peningkatan kesejahteraan masyarakat di Desa Teluk Nilap dikatakan baik dengan rata-rata nilai jawaban responden adalah 3,55.

Tabel 3: Hasil Jawaban Responden Tentang Bidang Pembangunan Infrastruktur (X1)

No	Item		SS	S	CS	TS	STS	Total	Rata-rata
1	Adanya pembangunan jalan Desa Teluk Nilap membuat aksesibilitas masyarakat meningkat	F	20	55	19	6	0	100	3,89
		S	100	220	57	12	0	389	
2		F	25	48	19	8	0	100	3,90

	Dengan adanya pembangunan jembatan di Desa Teluk Nilap mendukung pengangkutan hasil pertanian dan aksesibilitas masyarakat	S	125	192	57	16	0	390	
3	Adanya pembangunan tambatan atau tangkahan perahu di Desa Teluk Nilap mendukung ekonomi masyarakat dan penertibkan pengangkutan hasil pertanian	F	22	39	27	12	0	100	3,71
		S	110	156	81	24	0	371	
4	Adanya pembangunan irigasi di Desa Teluk Nilap memudahkan petani dan meningkatkan produksi pertanian	F	10	45	28	6	11	100	3,37
		S	50	180	84	12	11	337	
5	Tersedianya air minum di Desa Teluk Nilap memenuhi kebutuhan dasar masyarakat	F	18	31	20	26	5	100	3,31
		S	90	124	60	52	5	331	
6	Adanya pembangunan sanitasi di Desa Teluk Nilap mendukung tingkat kesehatan masyarakat	F	10	31	43	15	1	100	3,34
		S	50	124	129	30	1	334	
Skor Rata-rata									3,59
Kategori									Baik

Sumber : Data Olahan, 2021

Berdasarkan Tabel 3 diatas menunjukkan bahwa tanggapan responden pada item pertama “Adanya pembangunan jalan di Desa Teluk Nilap membuat aksesibilitas masyarakat meningkat” tanggapan responden dapat dikatakan baik dengan nilai rata-rata adalah 3.89. Pada item ke-2 “Dengan adanya pembangunan jembatan di Desa Teluk Nilap mendukung pengangkutan hasil pertanian dan aksesibilitas masyarakat” tanggapan responden dapat

dikatakan baik dengan nilai rata-rata adalah 3,90. Pada item ke-3 “Adanya pembangunan tambatan atau tangkahan perahu di Desa Teluk Nilap mendukung ekonomi masyarakat dan penertiban pengangkutan hasil pertanian” tanggapan responden dapat dikatakan baik dengan nilai rata-rata adalah 3,71. Pada item ke-4 “Adanya pembangunan irigasi di Desa Teluk Nilap memudahkan petani dan meningkatkan produksi pertanian” tanggapan responden dapat dikatakan cukup baik dengan nilai rata-rata adalah 3,37. Pada item ke-5 “Tersedianya air minum di Desa Teluk Nilap memenuhi kebutuhan dasar masyarakat” tanggapan responden dapat dikatakan cukup baik dengan nilai rata-rata adalah 3,31. Pada item ke-6 “Adanya pembangunan sanitasi di Desa Teluk Nilap mendukung tingkat kesehatan masyarakat” tanggapan responden dapat dikatakan cukup baik dengan nilai rata-rata adalah 3,34. Jadi dapat disimpulkan bahwa tanggapan responden terhadap pernyataan tentang pembangunan infrastruktur di Desa Teluk Nilap dikatakan baik dengan nilai rata-rata adalah 3,59.

Tabel 4: Hasil Jawaban Responden Tentang Bidang Pemberdayaan Masyarakat (X2)

No	Item		SS	S	CS	TS	STS	Total	Rata-rata
1	Dengan adanya pemberdayaan, masyarakat memiliki akses akan sumber pendapatan yang di perlukannya untuk mengembangkan diri	F	33	30	22	13	2	100	3,79
		S	165	120	66	26	2	379	
2	Dengan adanya pemberdayaan, masyarakat berpartisipasi mendayagunakan sumber pendapatan yang diakses	F	30	34	18	18	0	100	3,76
		S	150	136	54	36	0	376	
3	Dengan adanya pemberdayaan, masyarakat mampu mengontrol proses	F	29	26	28	17	0	100	3,67
		S	145	104	84	34	0	367	

	pendayagunaan sumber pendapatan yan diaksesny								
4	Dalam pemberdayaan masyarakat memiliki kedudukan yang sama	F	18	31	20	31	0	100	3,36
		S	90	124	60	62	0	336	
Skor Rata-rata									3,65
Kategori									Baik

Sumber : Data Olahan, 2021

Berdasarkan Tabel 2 diatas menunjukkan bahwa tanggapan responden pada item pertama “Dengan adanya pemberdayaan, masyarakat memiliki akses akan sumber pendapatan yang di perlukannya untuk mengembangkan diri” tanggapan responden dapat dikatakan baik dengan nilai rata-rata adalah 3,79. Pada item ke-2 “Dengan adanya pemberdayaan, masyarakat berpartisipasi mendayagunakan sumber pendapatan yang diaksesnya” tanggapan responden dapat dikatakan baik dengan nilai rata-rata adalah 3,76. Pada item ke-3 “Dengan adanya pemberdayaan, masyarakat mampu mengontrol proses pendayagunaan sumber pendapatan yan diaksesnya” tanggapan responden dapat dikatakan baik dengan nilai rata-rata adalah 3,67. Pada item ke-4 ”Dalam pemberdayaan masyarakat memiliki kedudukan yang sama” tanggapan responden dapat dikatakan cukup baik dengan nilai rata-rata adalah 3,36. Jadi dapat disimpulkan bahwa tanggapan responden tentang pemberdayaan masyarakat di Desa Teluk Nilap dikatakan baik dengan nilai rata-rata 3,65.

Analisis Korelasi Spearman Rank

Uji korelasi *spearman rank* untuk menguji hubungan dari dua variabel yang diteliti, yaitu hubungan antara bidang pembangunan infrastruktur (X_1) dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat (Y) dan hubungan antara bidang pemberdayaan masyarakat (X_2) dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat (Y). Berikut adalah tabel hasil uji Korelasi Spearman Rank.

Tabel 5: Hasil Uji Korelasi *Spearman Rank*

Correlations

			Bidang Pembangunan Infrastruktur	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat
Spearman's rho	Bidang Pembangunan Infrastruktur	Correlation Coefficient	1,000	,551**	,600**
		Sig. (2- tailed)	.	,000	,000
		N	100	100	100
	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Correlation Coefficient	,551**	1,000	,640**
		Sig. (2- tailed)	,000	.	,000
		N	100	100	100
	Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat	Correlation Coefficient	,600**	,640**	1,000
		Sig. (2- tailed)	,000	,000	.
		N	100	100	100

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Sumber: Data Olahan, 2021

Berdasarkan hasil pengujian Korelasi *Spearman Rank* pada Tabel 5 menunjukkan :

- Variabel Bidang Pembangunan Infrastruktur (X_1) memiliki nilai Sig (0,000) lebih besar dari 0,05, artinya bahwa terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara Bidang Pembangunan Infrastruktur (X_1) dengan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat (Y).
- Variabel Bidang Pemberdayaan Masyarakat (X_2) memiliki nilai Sig (0,000) lebih besar dari 0,05, artinya bahwa terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara Bidang Pemberdayaan Masyarakat (X_2) dengan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat (Y).

PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan dalam penelitian ini ditemukan bahwa penggunaan Dana Desa bidang pembangunan infrastruktur dapat meningkatkan

kesejahteraan masyarakat. hal ini dibuktikan dengan hasil analisis korelasi *spearman rank* yang menunjukkan bahwa variabel bidang pembangunan infrastruktur (X_1) memiliki nilai Sig (0,000) lebih besar dari 0,05, yang artinya bahwa terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara Bidang Pembangunan Infrastruktur (X_1) dengan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat (Y). perubahan peningkatan pembangunan infrastruktur serah positif dan signifikan terhadap pemberdayaan masyarakat. Fakta ini menunjukkan bahwa penggunaan Dana Desa bidang pembangunan infrastruktur memberikan kontribusi yang baik dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Hubungan positif dan signifikan antara Bidang Pembangunan Infrastruktur (X_1) dengan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat (Y) disebabkan oleh beberapa hal, adanya pembangunan infrastruktur jalan, adanya pembangunan infrastruktur jembatan dan adanya pembangunan tambatan atau tangakahan perahu untuk tempat pembongkaran hasil pertanian. Pembangunan infrastruktur tersebut sangat dibutuhkan oleh masyarakat oleh masyarakat untuk aksesibilitas sehingga kesejahteraan masyarakat meningkat. Kemudian dalam pembangunan infrastruktur juga dilakukan secara swakelola dan memberdayakan masyarakat sekitar dalam pengerjaan nya sehingga masyarakat mendapatkan penghasilan dengan pembangunan infrastruktur yang dilakukan di Desa Teluk Nilap.

Hasil penelitian ini relevan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Sagala (2019), yang menyimpulkan bahwa, pertama infrastruktur jalan mempunyai pengaruh secara signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat Kabupaten Labuhanbatu Utara. kedua sumber daya alam berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat di Labuhanbatu Utara. Kemudian Rahayu (2020), menemukan bahwa ketersediaan infrastruktur jalan berkorelasi cukup erat dengan kesejahteraan yang sifatnya materiil dengan arah hubungan positif. Tetapi tidak berkorelasi dengan kesejahteraan yang sifatnya immateriil.

Selanjutnya berdasarkan hasil analisis yang dilakukan dalam penelitian ini ditemukan bahwa penggunaan Dana Desa bidang pemberdayaan masyarakat dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. hal ini dijelaskan dengan hasil analisis korelasi *spearman rank* yang menunjukkan variabel bidang pemberdayaan masyarakat (X_2) memiliki nilai Sig (0,000) lebih besar dari 0,05, artinya bahwa terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara Bidang Pemberdayaan Masyarakat (X_2) dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat (Y).

fakta ini menunjukkan bahwa penggunaan Dana Desa bidang pemberdayaan masyarakat memberikan kontribusi yang baik dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Beberapa penelitian terdahulu memiliki hasil penelitian yang relevan dengan penelitian ini. Seperti yang dilakukan Wardani dan Utami (2020), menyimpulkan bahwa pemberdayaan masyarakat berpengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat, sedangkan transparansi pengelolaan keuangan Dana Desa tidak berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat. Kemudian penelitian yang dilakukan Lalaun dan Siahaya (2015), yang menyimpulkan pertama terdapat perbedaan pengaruh yang signifikan pada dampak program pemberdayaan terhadap kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Yaru Kabupaten Maluku Tenggara Barat.

KESIMPULAN

Dari pembahasan diatas dapat dibuat kesimpulan sebagai berikut :

1. Pengalokasian Dana Desa di Desa Teluk Nilap Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir sudah terealisasi pada bidang pembangunan infrastruktur dan bidang pemberdayaan masyarakat.
2. Pengalokasian Dana Desa Teluk Nilap Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir bidang pembangunan infrastruktur memiliki hubungan yang positif dan signifikan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
3. Pengalokasian Dana Desa Teluk Nilap Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir bidang pemberdayaan masyarakat memiliki hubungan yang positif dan signifikan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Basri, I. A. (2005). *Islam dan Pembangunan Ekonomi*. Gema Insani Press.
- Boediono. (1998). *Teori Pertumbuhan Ekonomi*. BPFE.
- Dumairy. (2006). *Prekonomian Indonesia*. Erlangga.
- Haryanto, T. P. (2013). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007-2011. *Economics Development Analysis Journal*, 2(3), 148–158.

- Kuncoro, M. (2010). *Otonomi dan Pembangunan Daerah*. Fokusmedia.
- Lalaun, A., dan Siahaya, A. (2015). Dampak Program Pemberdayaan Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Di Kecamatan Yaru Kabupaten Maluku Tenggara Barat. *Jurnal Administrasi Publik*, 5(2), 73–86.
- Mangkoesebroto, G. (2002). *Ekonomi Publik*. BPFE.
- Nyoman, B. I. (1991). *Pembangunan Desa Berwawasan Lingkungan*. Bumi Aksara.
- Rahayu, L. (2020). Korelasi Antara Kesenjangan Pembangunan Infrastruktur Jalan Dengan Kesejahteraan Penduduk di Indonesia. *JURNAL PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA*, 3(1), 1–13.
- Soetomo. (2014). *Kesejahteraan dan Upaya Mewujudkannya Dalam Perpektif Masyarakat Lokal*. Pustaka Belajar.
- Sukirno, S. (2013). *Pengantar Ekonomi Makroekonomi*. PT Raja Grafindo Persada.
- Tampubolon, D., Syahza, A., Sugiarto, S., Kausar, dan Herlon, M. (2018). *Manfaat Dana Desa di Provinsi Riau*. Badan Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan, dan informasi.
- Todaro, M. P., dan Smith, S. C. (2006). *Pembangunan Ekonomi* (Kesembilan). Erlangga.
- Wardani, D. K., dan Utami, R. R. P. (2020). Pengaruh Transparansi Pengelolaan Keuangan Dana Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa Sidoharjo. *Jurnal Kajian Bisnis*, 28(1), 35–50.
- Widjaja, H. (2003). *Pemerintahan Desa/Marga Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah*. Raja Grafindo Persada.
- Wrihatnolo, R. R., dan Dwidjowijoto, R. N. (2007). *Manajemen Pemberdayaan*. Elex Media Komputindo.